**PENINDAKAN DAN PENYELIDIKAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI
TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2014-2015**

Oleh : Rahmat Firdaus

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The background of the problem in this study is Ministerial Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 clearly regulating the prohibition on the import of used clothing, but in reality, the distribution of imported used clothing is still found in Tembilahan City. The formulation of the problem in this study is how the Enforcement and Investigation by the Madya C Tembilahan Customs and Excise Office on smuggling imported used clothing in Indragiri Hilir district in 2014-2015. This type of research uses a qualitative approach. The purpose of this study was first, to find out about the prosecution and investigation by the Customs and Excise Office of smuggling imported used clothing in Indragiri Hilir district in 2014-2015. Secondly, to find out the findings obtained by the customs and excise office in 2014-2015 and third, to find out the obstacles and evaluation of the Tembilahan Customs and Excise office in conducting prosecution and investigation. The results of this study indicate, even though the C Customs and Excise type office of C Tembilahan has carried out its duties well, by tightening investigations and prosecution, there are still efforts by smugglers to find loopholes to smuggle used clothing into the Tembilahan area. In carrying out its duties in the field of investigation and prosecution of smuggling of imported used clothing, the Customs and Excise office of the C Tembilahan type also has obstacles.

Keywords : *Prosecution, Customs and Excise Offices, Smuggling of Used Clothing*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepastian, kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai penutup tubuh, dari aspek social dan ekonomi pakaian juga mempunyai fungsi lain yang dapat menunjukkan lambang status atau identitas seseorang.

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah Bangsa Indonesia sebagai Negara jajahan. Warga pribumi kala itu berusaha untuk meniru mode berpakaian Bangsa Eropa yang menjajah Bangsa Indonesia oleh karenanya sedikit banyak mode berpakaian dipengaruhi oleh Bangsa Eropa. Perkenalan warga pribumi dengan gaya berpakaian Bangsa Eropa kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya penyebaran pakaian keseluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi yang dunia seakan tanpa batas. Pakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan criteria sosial, politik dan budaya tertentu namun juga mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian yang menjelma sebagai keinginan yang sama.

Berkembangnya gaya Fashion di Negara Indonesia memang tidak dapat dihindari lagi. Dari model terkenal, artis ibukota hingga pejabat serta kaum masyarakat menengah kebawah pun masih menjadikan fashion sebagai salah

satu hal penting dalam kehidupannya. Bermula dari kebutuhan yang kemudian menjadi keinginan manusia, saat ini banyak orang membeli pakaian karena dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan awal pelaku bisnis pakaian bekas impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak semua orang mampu membeli pakaian yang memiliki merek ternama dengan harga mahal. Usaha pakaian bekas impor menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang ingin tetap fashionable dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah.

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan pada tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah, yaitu:

1. Malaysia (Port Klang, Kuantan, Johor) ke pantai timur Sumatera (Pangkalan Brandan, Pematang Siantar, Dumai)
2. Malaysia (Tawao) ke Wanci, Palu, Makassar
3. Singapura ke Batam, Pesisir Timur Sumatera, Pulau Wanci, Dili
4. Timor Leste (Dili) ke Kupang, Maumere, Pulau Wangiwangi (Wanci)
5. Pulau Wangiwangi (Wanci) di Wakatobi ke Kendari, Makassar
6. Makasar ke Ambon, Bitung, Ternate, Poso, Manado, Surabaya
(Sumber: *Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015*)

Dari semua jalur wilayah masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia masuk melalui bagian timur pesisir Indonesia. Dirjen Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, menyebutkan bahwa penyebab masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Menurut Widodo pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian timur yaitu 130 pelabuhan, dan 30 pelabuhan di Batam. Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Wilayah penampung pakaian bekas paling banyak adalah Tembilahan.

jumlah pedagang pakaian bekas yang ada di Tembilahan mengalami penurunan setelah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Melihat hal tersebut, menurut para pedagang yang dijumpai di pasar pakaian bekas di Tembilahan, penurunan jumlah pedagang pakaian bekas tersebut disebabkan karena harga pakaian bekas perbal semakin mahal dan bagi sebagian pedagang yang tidak memiliki modal yang cukup terpaksa berhenti berjualan pakaian bekas.

Namun dengan berkurangnya jumlah pedagang pakaian bekas di Tembilahan tidak membuat pasar-pasar pakaian bekas yang ada di Tembilahan sepi pembeli. Masyarakat dari Tembilahan maupun dari luar Tembilahan masih ramai untuk membeli pakaian bekas walaupun harga pakaian bekas saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Dari segi penghasilan para pedagang merasa tidak ada yang berubah baik sebelum maupun sesudah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Rata rata penghasilan pedagang perhari sekitar

kota Tembilahan dibanjiri penyelundupan pakaian-pakaian bekas yang masuk, dapat dilihat dari banyaknya pakaian bekas yang dijual di pasar-pasar di tembilahan seperti di pasar pagi, pasar kayu jati dan pasar jongkok yang muncul di malam hari. lemahnya pengawasan pemerintah membuat tingginya tingkat peredaran pakaian bekas di Tembilahan. Aksi penyelundupan pakaian bekas di Tembilahan, melibatkan masyarakat setempat, bahkan sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari transaksi penjualan pakaian bekas ilegal. Rp.100.000-Rp.300.000, tergantung ramai atau sepi pembeli.

Bisnis pakaian bekas di Tembilahan begitu sulit untuk dihentikan. Hal itu sebabkan karena bisnis pakaian bekas di Tembilahan telah berkembang menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Sangat banyak orang yang telah menggantungkan hidup dari hasil penjualan pakaian bekas impor tersebut. Disana ada agennya, ada kuli yang mengangkut pakaian bekas impor ke kapal, ada kuli yang melakukan bongkar muat di pelabuhan, ada pengusaha mobil yang mengangkut barang, ada tukang becak yang mengantar pakaian bekas ke kios, dan lain sebagainya. Begitu banyak orang yang terlibat disana, sehingga kalau larangan tentang pakaian bekas impor tersebut tetap dilanjutkan tanpa memberi jalan keluar, akan banyak orang yang akan kehilangan mata pencaharian.

Dalam melakukan fungsi pengawasannya, DJBC juga diberikan beberapa wewenang seperti wewenang patroli, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan pembukuan (dalam hal audit), pemeriksaan bangunan, sarana pengangkut, dll. Ruang lingkup

Pengawasan aparat Bea dan Cukai meliputi seluruh wilayah NKRI baik darat, laut, maupun udara. Daerah pengawasan ini juga termasuk berbagai wilayah perbatasan.

Untuk daerah yang menjadi wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan membawahi 3 Kabupaten, yaitu Inderagiri Hilir, Inderagiri Hulu dan Kuantan Sisingi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu Direktorat (instansi dibawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kementerian keuangan. Jadi lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia.

Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian bekas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam UU No. 7 tahun 2014 pasal 47 ayat 1 tentang perdagangan, menyebutkan bahwa setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian berdasarkan Peraturan menteri perdagangan dan kopearasi No. 51 tahun 2015 pasal 2 mengatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pakaian bekas impor dilarang oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini diabaikan oleh sekelompok oknum yang ingin mencari keuntungan, sehingga pakaian bekas tetap masuk ke Indonesia, terutama ke kota Tembilahan yang dikenal sebagai pusat impor pakaian bekas di Provinsi Riau.

TINJAUAN TEORI

Angger Sigit P. (2016:13) Menurut Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor. 53 tahun 2010 tentang tata laksana pengawasan memuat penjelasan tentang penindakan dan Penyidikan.

Muchsan (Angger Sigit P,2016:15) menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir (Angger Sigit P,2016:18) adalah :

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen

pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

2. Agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mendalam mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini juga lebih menekankan analisisnya pada proses pengambilan keputusan secara induktif dan juga deduktif serta analisis pada fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan metode ilmiah

HASIL PENELITIAN

1. Proses Penindakan dan Penyelidikan yang Dilakukan Oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Indragiri Hilir Tahun 2014-2015.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Seksi Penindakan dan Penyidikan Direktorat (P2) Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dibidang Kepabeanan salah satunya adalah penindakan penyelundupan dalam hal ini penyelundupan pakaian bekas.

Berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara kepada Kasi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yaitu Emil Takeshy Sampetoding, beliau memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan, penindakan dan penyidikan penyelundupan pakaian bekas lintas negara, sebagai berikut :

“Dalam melakukan penyelidikan dan penindakan, kami berpegangan kepada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010, sedangkan ketentuan pidananya atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-undang Kepabeanan serta ketentuan

pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Pak Emil Takeshy, beliau mengemukakan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai”.

Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada

saat ini dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Dalam hal penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Dari hasil wawancara dengan staff Seksi Penindakan dan Penyidikan Pak Zaky di KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan

menerangkan bahwa tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api”.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanaan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-undang yakni Undang-undang Kepabeanaan dan Cukai. Namun berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanaan atau tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Pak Emil Takeshy, beliau mengemukakan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai”.

Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Subdirektorat Intelijen
- 2) Subdirektorat Penindakan dan Sarana Operasi
- 3) Subdirektorat Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Angger Sigit P. (2016:20), jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai seperti pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja

dan sumber-sumber lain. Sedangkan pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan lewat post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

Berdasarkan data diatas tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan pakaian bekas dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ini tidak masuk ke wilayah Indonesia.

Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan

Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Dalam hal penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Pak Emil Takeshy di KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan menerangkan bahwa tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan

penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api”.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Yang dimaksud “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

Terhadap Undang-undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana Kepabeanan yang terjadi. Dengan demikian idealnya, dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Pemerintah dimaksud, tapi proses Penyidikan Oleh Bea dan Cukai harus tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Pakaian bekas (*ballpress*) sangat banyak diselundupkan di wilayah kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan, tingkat konsumsi yang tinggi oleh masyarakat Tembilahan membuat penyelundupan pakaian bekas semakin marak terjadi.

Tembilahan yang sejak dulu Proses penindakan yang dilakukam oleh tim P2, pak Emil menjelaskan :

“kami melakukan patroli secara rutin di perairan Indragiri Hilir ini dengan jadwal yang telah kami tetapkan. Bisa kami lakukan di pagi, siang malam, bahkan terkadang kami lakukan patroli pada dini hari karena kita tidak tahu kapan penyelundupan akan terjadi, yang jelas kami melakukan hal tersebut untuk mencegah adanya penyelundupan terkait bea dan cukai”

2. Temuan yang didapat oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan selama tahun 2014 – 2015 di Kabupaten Indragiri hilir.

Tabel 3.1
Data Penindakan dan Pemusnahan pakaian bekas oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan

No	Jumlah Pakaian Bekas	Tanggal Penindakan	Tanggal Pemusnahan
1	630 Karung	13 Februari 2014	24 Juni 2014
2	567 Karung	13 mei 2014	24 Juni 2014

3	842 Karung	14 Desember 2014	16 desember 2014, 26 Maret 2015
4	20 Karung	26 Juli 20115	18 Agustus 2015
5	Total	2159 Karung	

Sumber : Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan telah optimal terbukti dengan ditindaknya 2159 karung pakaian bekas sepanjang tahun 2014 dan 2015.

Sementara itu jumlah pakaian bekas impor yang masuk ke Kota Tembilahan menurun drastis pada tahun 2015 hingga saat ini, harga pakaian bekas pun tidak semurah dulu lagi, karena proses impor pakaian bekas sekarang ini

Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang

pedagang pakaian bekas impor, Deni, beliau menjelaskan :

“Barang yang langsung masuk dari luar masih ada, namun kebanyakan barang yang dijual disini kebanyakan datang dari Medan dan Dumai.”

Ketika ditanya dari mana asal datangnya pakaian bekas Medan dan Dumai, beliau menjawab :

“Kalo di Medan atau Dumai barang masih bisa masuk, saya tidak tau barang nya dari mana, kalo disini sudah susah, sering kena razia.”

sangat susah dikarenakan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan serta mahalanya ongkos kirimnya membuat harga jual pakaian bekas terpaksa dinaikan, dan imbasnya kepada pedagang pakaian bekas adalah jumlah penghasilan mereka turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Ikhsan, salah satu pedagang pakaian bekas di Kota Tembilahan, dikarenakan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan membuat mereka sulit mendapatkan pasokan pakaian bekas. Menurutnya hal itu juga yang mengakibatkan pasokan pakaian bekas impor sempat terhenti beberapa bulan

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas impor, diperoleh jawaban bahwa pakaian-pakaian bekas yang beredar di Kota Tembilahan Kebanyakan diperoleh dari Sumatera Utara dan Dumai meskipun masih ada yang masuk dari luar Indonesia lewat perairan Indragiri Hilir ke Pelabuhan-pelabuhan tikus. Hal ini tidak lepas dari telah optimalnya pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Emil Takeshy :

“Kurangnya pasokan pakaian bekas impor di Tembilahan itu saya yakin karena efek dari penindakan yang kita lakukan, menurut saya pengawasan yang

kita lakukan sudah optimal, namun akan terus kita tingkatkan. Kalau anda liat di media, di sentra yang sekarang masih ramai itu di Asahan, Sumatera Utara, di sana masih rutin terus terjadi pemasukan, namun terus ditegas oleh teman-teman Bea Cukai di sana.”

Dalam hal ini melihat dari sisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat baik itu pedagang pakaian bekas maupun konsumen pakaian bekas tentang Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Berikut adalah hasil wawancara dengan staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

“Ketika Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini disahkan kami belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli pakaian bekas tentang larangan impor pakaian bekas. Karena keterbatasan untuk membiayai pelaksanaan sosialisasi”

Beliau menambahkan :

“Kendala terhambatnya pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini dikarenakan pertimbangan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan baik itu sosialisasi dan kegiatan lainnya”

Hasil yang sama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Emil Takeshy :

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum pernah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai tentang Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kalau Sosialisasi itu urusannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian bukan tugas kami. Bea dan Cukai hanya sebagai unit pelaksana teknis dari peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan”

3. Kendala dan Evaluasi Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan Dalam Melakukan Pengawasan dan Penindakan

1. Keterbatasan SDM

Kurangnya personel tentu menghambat kinerja yang dilakukan oleh Bea Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas. Jumlah personel yang terdapat di Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) hanya berjumlah tujuh (7) orang diantaranya Emil Takeshi sebagai kepala seksi dan Raihan, Andre, Zaky, Roni, Nugi, Whisnu sebagai anggota. Hal ini menjadi sangat tidak ideal untuk melakukan tugas pengawasan, namun hal ini tidak dijadikan alasan bagi mereka, dengan memaksimalkan jumlah personel yang ada untuk memperoleh kinerja yang optimal, seperti yang telah diutarakan oleh Kasi P2, Emil.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana tentu mempengaruhi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mengingat luas wilayah perairan Indragiri Hilir yang mencapai

6.318 km, seperti yang diutarakan oleh Kasi P2:

“Kapal patroli kita punya 1 ukuran 10 meter, terus 5 pucuk laras panjang dan 5 pucuk laras pendek sangat tidak memadai dengan luas nya perairan Indragiri Hilir.”

Beliau menambahkan :

“kami melakukan patroli ke perairan yang menjadi wilayah kami dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun kami juga bisa melakukan patrol dadakan jika ada informasi laporan tentang penyelundupan untuk mencegah terjadi nya penyelundupan baik pakaian bekas, maupun barang-barang lain yang menyangkut Bea dan Cukai”.

Tabel 3.2 Jumlah sarana

No.	Sarana	Jumlah
1.	Speed Boat Patroli	1 Unit
2.	Senjata Laras Panjang	5 Unit
3.	Senjata Laras Pendek	5 Unit

Sumber : Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan tahun 2015

Dalam masalah kekurangan sarana, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sedang mengupayakan adanya pengadaan penambahan unit speed boat patroli, agar menunjang kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

3. Pakaian Bekas Sebagai Mata Pencapaian Masyarakat

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pak Emil, beliau memaparkan:

“Yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan ini, memberikan pengertian kepada mereka bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah ilegal, sambil mengarahkan mereka mencari sumber penghidupan yang lain.”

4. Tingginya Minat Konsumsi Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas

Untuk masalah ini, tentu tidak menjadi wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, dalam hal ini diperlukan adanya peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas dengan berbagai alasan seperti pakain bekas adalah barang ilegal, membawa penyakit, pakaian bekas tidak memberi keuntungan pada Negara dan alasan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2), beliau menerangkan :

“Kendalanya berhubungan dengan kondisi sosial Masyarakat yang menjadikan pakaian bekas ini sebagai mata pencapaian, sehingga hampir semua penindakan itu selalu berujung konflik dengan Masyarakat, khususnya pemilik barang ya.”

Penulis melakukan wawancara dengan Agus, salah satu pedagang pakaian bekas :

“Dari sinilah (berdagang pakaian bekas) saya bisa ngasi makan anak istri bang, kalo tak kerja ini, kami kerja apa lagi? Lagipun pekerjaan ini belum dilarang oleh pemerintah daerah kita kan.”

Ketika penulis memberi tahu barang yang diperjual-belikannya adalah barang ilegal, beliau menjawab :

“Ya, yang penting saya mencari nafkah dengan cara yang halal, saya beli barang (pakaian bekas) dari agen, terus saya jual, salah saya dimana? Yang saya jual juga pakaiankan? Bukan bir.”

Selain itu kendala lainnya yang menghambat kinerja Bea Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan dan penindakan yakni kurangnya pegawai yang terdapat pada Seksi Penindakan dan Penyidikan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pak Emil Takeshy:

“Untuk Seksi penindakan, itu pegawainya ada 1 orang Kepala Seksi, 1 orang tugas fungsional dan 5 orang pelaksana, jumlahnya sangat tidak ideal dengan tugas pengawasan, Untuk pengawasan tentu lebih banyak anggota lebih bagus, cumakan pemerintah terbatas menyediakan pegawai, tapi hal ini tidak bisa kita jadikan alasan, kita maksimalkan aja apa yang ada.”

Kendala lain yang menghambat Bea Cukai Tembilahan dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas yakni tingginya minat masyarakat terhadap konsumsi pakaian bekas membuat tingginya tingkat penyelundupan pakaian bekas di Indonesia.

Penulis melakukan wawancara dengan Rifa'i, seorang konsumen pakaian bekas, dia menuturkan:

“Saya membeli pakaian bekas ini, ya....karena memang kualitasnya yang bagus, apalagi barang-barang “peje” ini banyak barang-barang yang bermerk, diluar sana tu kan dilarang jualan baju yang palsu, jadi kalau ada baju merk levi's yah pasti asli....beda sama disini.”

Wawancara yang dilakukan dengan konsumen pakaian bekas bernama Rani, kutipan sebagai berikut:

“Dengan seratus ribu saya bisa membeli 3 baju yang bermerk, pakaiannya sama bagusnya dengan ada yang di mall, kualitas bahannya juga bagus. Kalau di mall harganya mahal, palingan harga yang paling murah sekitar seratus lima puluh ribu, itupun kalau bajunya diskon”

Hasil yang serupa dikatakan oleh ibu Rasidah dengan kutipan sebagai berikut:

“Saya lebih suka membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru, karena dari segi harga sangat jauh lebih murah dibanding dengan pakaian baru dan kualitasnya pun sama

bagusnya dengan pakaian baru. Apalagi penghasilan saya terbatas, punya 3 orang anak. Pakaian bekas menjadi solusi terbaik untuk saya”

Tingginya konsumsi masyarakat Tembilahan, membuat peredaran pakaian bekas di Kota Tembilahan masih tinggi, bahkan ada istilah “kalau ke Tembilahan belum afdol kalau belum ke pasar *peje*”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penindakan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan telah dilaksanakan dengan maksimal, terbukti dengan semakin berkurangnya pasokan pakaian bekas dari luar negeri yang masuk ke Tembilahan. Meskipun Bea Cukai Tembilahan telah menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, dengan memperketat pengawasan, tetap saja masih ada upaya yang dilakukan penyelundup guna mencari celah menyelundupkan pakaian bekas ke wilayah Tembilahan.
2. Pada tahun 2014 dan 2015 Kantor Bea dan Cukai Tembilahan mendapatkan banyak temuan. Sekaligus menindak dan menyelidiki barang bekas impor yang diselundupkan ke wilayah kabuapten Indragiri Hilir melalui Jalur laut karena lokasi geografis kabupaten Indragiri Hilir yang

berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.

3. Dalam menjalankan tugasnya dibidang penindakan dan penyelidikan penyelundupan pakaian bekas lintas Negara, Bea dan cukai Tembilahan juga mempunyai kendala-kendala, yaitu:
  - a. Kondisi sosial Masyarakat yang menjadikan pakaian bekas sebagai sumber mata pencaharian;
  - b. Tingkat konsumsi yang tinggi masyarakat Tembilahan terhadap pakaian bekas;
  - c. Adanya perlawanan fisik dari penyelundup;
  - d. Kurangnya personel yang melakukan tugas penindakan dan penyelidikan.

Saran

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, antara lain

1. Meskipun penindakan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai Tembilahan Telah maksimal, seharusnya lebih diperkuat lagi dalam melakukan penindakan dan penyelidikan. Perlu adanya penguatan kewenangan yang diberikan kepada Bea Cukai, dalam hal menindak barang yang telah masuk, sehingga Bea Cukai Tembilahan diharapkan dapat menindak agen-agen pakaian bekas.
2. Perlu adanya penambahan personel, fasilitas pengawasan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan guna terciptanya kinerja yang ideal..

3. Bagi konsumen dan para penjual pakaian bekas khususnya agar lebih mengetahui tentang peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan tentang larangan pakaian bekas dan lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta. Graha ilmu.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana
- Makmur. 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Niti Semito, Alex. S. (2008). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pramukti, Angger Sigit, 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Ritonga, Jauhari, Hasnun, 2015. *Manajemen Organisasi*. Medan. Perdana Publishing.
- Syamsi, 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Prenada Media.
- Usman, Husaini, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan Perundang undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Skripsi

Roby Aditya, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Tembilahan).

Feby Sabrina, Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau, Pengawasan Pelayanan Ekspor Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai Tahun 2011-2013.

Dewiyanti Ratnasari, Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin Makasar, Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Makasar.

Sumber Lain

- <http://www.inhilklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaian-bekas.html>
- www.bertuahpos.com
- <http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1.5.Miliar.Digagalkan>